

Jokowi Minta Masyarakat Aktif Mengkritik Pelayanan Publik

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif memberi kritik atau masukan kepada pelayanan publik. Hal tersebut perlu dilakukan demi mencegah potensi maladministrasi dan untuk perbaikan.

"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi," katanya dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman 2020 secara virtual, Senin (8/2).

Sementara itu, kata Jokowi, penyelenggara pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan. Dengan demikian, harapan terciptanya layanan publik yang baik dapat terwujud.

Menurut Kepala Negara, pelayanan publik di masa pandemi corona harus mampu mengubah frekuensinya kerjanya dari normal ke extraordinary atau luar biasa. ● han

Pelayanan publik juga harus mengubah mindsetnya agar tidak terjebak pada rutinitas dan bekerja secara inovatif dan smart shortcut.

"Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Saya yakin Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," tutur Jokowi.

Di akhir sambutannya, Jokowi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta anggota Ombudsman periode 2016-2021. Sementara untuk pimpinan dan anggota Ombudsman periode 2021-2026, Kepala Negara mengucapkan selamat bertugas.

Jokowi berharap Ombudsman dapat terus membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. ● han

Johnny Plate: Sekarang Kominfo Disebut sebagai Kementerian Blokir

JAKARTA (IM) - Menteri Komunikasi, Teknologi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, saat ini Kemenkominfo kerap disebut kementerian blokir. Itu karena Kemenkominfo selalu konsisten memutus akses terhadap berbagai konten yang dianggap melanggar hak cipta.

Oleh karena itu, Johnny meminta media berperan untuk turut melakukan literasi digital kepada masyarakat agar konten yang diblokir kian berkurang.

"Kominfo jadi lebih banyak dikenal sebagai Kementerian blokir jadinya, blokir konten, take down konten. Nah ini pentingnya media bersama-sama Kominfo untuk melakukan literasi digital di tingkat yang sangat basic," kata Johnny di acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Senin (8/2).

Johnny mengatakan, sepanjang 2020, Kominfo melakukan take down terhadap 2.859 konten yang me-

langgar kekayaan intelektual. Kemudian pada tahun 2021, dalam waktu sebulan pihaknya juga secara konsisten memutus akses terhadap 360 konten yang melanggar kekayaan intelektual termasuk di antaranya melanggar hak cipta.

Di Kemenkominfo, kata dia, ada beberapa level yang digunakan untuk melakukan penanganan konten-konten bermasalah.

"Saya sampaikan gerakan penyebaran hukum di ruang digital kali ini berjalan bergandengan tangan dan bersama-sama dengan penegakan hukum oleh Bareskrim Polri di ruang fisik, ruang digital oleh Kominfo," katanya. Saat Kemenkominfo dan Bareskrim bekerja sama itulah, kata dia, media dan pers diharapkan bisa turut mendukung agar ruang digital di Tanah Air menjadi semakin bersih. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk menciptakan regulasi yang mendukung ekosistem industri media secara berkelanjutan. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



VAKSINASI COVID-19 UNTUK TENAGA KESEHATAN LANSIA

Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 produksi Sinovac kepada tenaga kesehatan berusia lanjut saat kegiatan vaksinasi massal dosis pertama di Rumah Sakit Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Senin (8/2). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulai vaksinasi tenaga kesehatan di atas 60 tahun setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan vaksin tersebut untuk lansia.

DPR Nilai Negara Maladministrasi dalam Kasus Bupati Sabu Raijua

Dalam kasus Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT, yang ternyata masih WNA, bukti pemerintah tidak profesional lakukan seleksi administrasi dan buruknya pengarsipan kependudukan.

JAKARTA (IM) - Kasus dugaan kewarganegaraan ganda Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih, Orint P Riwu Kore yang diketahui berstatus se-

bagai warga negara Amerika Serikat menunjukkan bahwa telah terjadi maladministrasi oleh negara.

"Kasus Bupati Terpilih Orint P Riwu Kore calon

bupati terpilih dalam Pilkada Sabu Raijua, NTT. Telah Membuktikan telah terjadi maladministrasi oleh negara. Ketika proses catatan kependudukan kita belum mampu merekam dengan baik status kependudukan warga negara," ujar anggota Komisi II DPR Anwar Hafid, Senin (7/2).

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang memiliki kolom kewarganegaraan tidak cukup

karena lemahnya sistem koordinasi dan kontrol atas data kependudukan dengan pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian serta Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan catatan sipil.

"Karena itu, kasus ini mesti mendapatkan perhatian oleh semua pihak untuk memperbaiki data perekaman kependudukan, data kewarganegaraan, serta data pemilihan," katanya.

Anwar melanjutkan, pada masa lalu, Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah berusaha mendorong Single Identity Number (NIK) sebagai upaya melahirkan satu data terintegrasi yang kini seharusnya digunakan dan dilanjutkan secara optimal.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah sebelumnya menyebutkan masalah Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga masih WNA, hal yang amat serius. Menurutnya, ada dua kesalahan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, Dedi menjelaskan, pemerintah dinilai tidak profesional dalam melakukan seleksi administrasi, dan bahkan hingga proses Pilkada berakhir. Kedua, pengarsipan kependudukan buruk.

"Hal ini menandai buruknya tata kelola KPU dan

lembaga-lembaga terlibat, semisal BPS hingga Kemenlu. Kedua, buruknya pengarsipan kependudukan," katanya ketika dihubungi, Sabtu (6/2).

Dua hal dasar di atas, kata Dedi, semestinya tidak terjadi di usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 75 Tahun. Dia turut menyinggung janji kampanye Pilpres pertama Presiden Joko Widodo yang mengatakan akan membawa perubahan tata kelola pemerintah berbasis teknologi.

"Kejadian ini bukti kecil jika kampanye itu masih kosong implementasi," tuturnya.

Tanggung jawab paling ideal oleh seluruh pihak, kata Dedi, yaitu menangguhkan kemenangan Orint. Menurutnya, jika terbukti memiliki status warga negara asing, maka hukum harus benar-benar harus ditegakkan.

"Karena tentu ini bukan saja soal kelalaian panitia pemilihan, tetapi juga pembohongan dan penipuan, dan tentu negara dalam hal ini sebagai korban penipuan. Sementara secara etis, seluruh panitia yang terlibat layak untuk diberhentikan," ucapnya.

Dia menjelaskan, lambatnya koordinasi antar sesama lembaga dinilai masih menjadi titik kelemahan. Oleh karenanya, dapat menghambat banyak keputusan yang semestinya krusial dan memerlukan waktu singkat. "Pemerintah perlu segera memastikan status kasus ini karena bagaimanapun Pilkada telah usai, jangan sampai berlarut," ungkapnya. ● han

Seribuan Putra-Putri Papua Ikuti Pendidikan Bintara TNI AD

PAPUA (IM) - Sebanyak 1.000 putra putri asal Papua, kini sedang menjalani pendidikan calon Bintara TNI AD di sejumlah Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) di Pulau Jawa. Hal ini merupakan program Otonomi Khusus di wilayah Kodam XVIII/Kasuari 2020.

"Jadi, sengaja kami sebar di Pulau Jawa. Pertama, saya selaku Pangdam, kami punya Rindam tapi belum sempurna. Jadi, ada berapa pembina pengasuh pelatih dan alat fasilitas sarana belum terpenuhi sehingga kami titipkan di luar Kodam XVIII/Kasuari," kata Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, dalam tayangan Youtube TNI AD, Minggu (7/2).

Kedua, ujar I Nyoman, tujuannya dalam rangka mem-

berikan wawasan sehingga para siswa calon bintara mengetahui dan mengenal Indonesia secara utuh, bukan hanya Papua dan Papua Barat. Ketiga, jumlah siswa calon bintara yang lolos seleksi cukup banyak mencapai 1.000 orang, sehingga tidak mungkin bisa ditangani pendidikannya hanya oleh satu Rindam.

"Kebetulan yang kami lihat siap dan bagus itu sementara di daerah Jawa, dan kebetulan kosong pendidikan di sana sehingga kami titip pendidikan di daerah Jawa," ujarnya.

Sebanyak 1.000 calon Bintara TNI tersebut, terdiri atas 330 siswa dikirim ke Rindam III/Siliwangi Bandung, 240 siswa Bintara ke Rindam IV/Diponegoro Semarang, 260 siswa ke Rindam V/Brawijaya Surabaya dan 130 calon Bintara

ke Rindam Jaya Jakarta.

Sebanyak 40 putri asli Papua mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Korps Wanita TNI Angkatan Darat (Kowad), Lembang, Bandung, Jawa Barat.

Komandan Rindam IV/Diponegoro Kolonel Inf Tarsono menjelaskan, setiap prajurit siswa yang mengikuti pendidikan harus melewati tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan masing-masing, baik kemampuan akademis, kesehatan, maupun jasmani.

Para calon Bintara Prajurit Karier (PK) Otsus Papua tersebut menempuh pendidikan selama 20 minggu, terhenti mulai 4 November 2020 hingga 23 Maret 2021, dengan materi pendidikan dasar keprajuritan. ● mei



IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN MUCHAMAD MUCHLIS

Tersangka, Mantan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Muchamad Muchlis (kanan) berjalan usai diperiksa di Jakarta, Senin (8/2). Muchamad diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Badan Informasi Geospasial (BIG) yang bekerja sama dengan LAPAN tahun 2015.

UU Cipta Kerja Berpotensi Maladministrasi Jika Aturan Turunan Tak Segera Diselesaikan

JAKARTA (IM) - Ombudsman RI menegaskan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berpotensi maladministrasi jika aturan turunannya tidak segera diselesaikan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Lely Pelitarsari, pada acara peluncuran Laporan Tahunan 2020 secara daring, Senin (8/2).

Menurut Lely, Ombudsman menyadari tidak mudah untuk memperbaiki layanan publik, terutama perbaikan yang bersifat sistemik. Prosesnya pun tak lepas dari kontroversi.

"Dari sejak awal kami bergabung 5 tahun yang lalu visi kami selalu berorientasi pada satu hal yakni pelayanan publik yang berkeadilan, walaupun kemudian Ombudsman harus berhadapan dengan beberapa kontroversi," ujar Lely.

Lely mencontohkan ketika pihaknya menangani laporan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di mana Ombudsman menginisiasi sistem zonasi. Tapi, sistem itu sempat menjadi kontroversi sebelum akhirnya diterima masyarakat.

Contoh lain diungkapnya terkait UU Cipta Kerja yang dinilai memiliki potensi maladministrasi. "Ombudsman mencermati bahwa kebijakan ini (UU Cipta Kerja) memiliki potensi maladministrasi apabila persoalan-persoalan pada aturan turunannya tidak segera diselesaikan," ujar Lely.

UU Cipta Kerja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pada 2 November 2020. Berdasarkan Pasal 185 UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaan UU tersebut wajib ditetapkan paling lama tiga bulan.

Aturan turunan UU Cipta Kerja terdiri atas 49 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Dua aturan yang sudah selesai yakni PP 73/2020 dan PP 74/2020. Selanjutnya, 38 RPP dan 4 RPerpres telah selesai dan disampaikan Menko Perekonomian kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

Adapun 9 RPP dan 1 RPerpres telah selesai dibahas dan sedang proses harmonisasi dan pembulatan substansinya. ● han

SEGENAP JAJARAN DIREKSI BESERTA STAF PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR

mengucapkan

SELAMAT HARI PERS NASIONAL (HPN) DAN HUT PWI KE 75

EKA BHINEKAS
DIREKTUR OPERSIONAL

HASANUDIN TAHIR
DIREKTUR UTAMA

EFI PANCAWATI
DIREKTUR UMUM

MK Hanya Sidangkan 126 Sengketa dari 132 Perkara Hasil Pilkada 2020

JAKARTA (IM) - Peneliti lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menyidangkan 126 dari total 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 yang terregistrasi di MK.

Enam perkara tidak disidangkan karena dicabut oleh pemohon setelah diregistrasi. "Dari 132 perkara ada 6 perkara yang tidak diproses lebih lanjut. Atau hanya ada 126 perkara," kata Ihsan dalam diskusi daring, Senin (8/2).

Ihsan menuturkan, dari total 126 perkara yang disidangkan di tahap pemeriksaan pendahuluan dan mendengarkan jawaban termohon atau pihak terkait, hanya 96 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap persidangan selanjutnya.

prediksi itu muncul berdasarkan beberapa alasan, yakni memenuhi batas waktu maksimal tiga hari kerja setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Serta, memenuhi legal standing yakni diajukan oleh pasangan calon atau pemantau pemilihan terakreditasi.

"Dan kami belum memproyeksikan ambang batas begitu. Karena sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, ambang batas akan diperiksa lebih lanjut di dalam pokok permohonan," ujarnya.

Dari 96 perkara tersebut ada tujuh permohonan sengketa pemilihan gubernur yang diprediksi akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Lalu ada 41 perkara permohonan sengketa pemilihan bupati yang juga akan lanjut ke tahap pemeriksaan dan pembuktian.

"Dan ada delapan perkara pemilihan wali kota yang juga kami proyeksikan akan lanjut ke tahap pembuktian selanjutnya," ungkapnya.

Ihsan juga memprediksi, akan ada 30 perkara yang tidak akan diterima majelis hakim konstitusi, di antaranya 27 perkara sengketa pemilihan bupati dan tiga perkara sengketa hasil pemilihan wali kota.

Alasan tidak diterimanya permohonan tersebut, lanjut dia, dikarenakan pengajuan dilakukan melebihi batas waktu yang ditetapkan untuk mengajukan sengketa yakni tiga hari kerja. ● mei